

**PENGUKURAN KINERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS
PUBLIK**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Disusun Oleh :

AMIN BUDI PRASETYA

NIM B 200 110 122

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUKURAN KINERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS
PUBLIK**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

AMIN BUDI PRASETYA
B. 200 110 122

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Zulfikar, SE. M.Si

PENGESAHAN

**PENGUKURAN KINERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN
KARANGANYAR SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS PUBLIK**

Oleh :

AMIN BUDI PRASETYA
NIM B 200 110 122

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 30 September 2017

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

Dr.Zulfikar SE, M.Si

(Ketua Dewan Penguji)

Dr. Fatchan Achyani, SE,M.Si

(Anggota Dewan Penguji 1)

Drs. Eko Sugiyanto, SE, M.Si

(Dewan Penguji 2)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, MM)

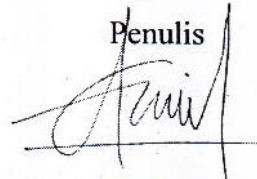
PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan alam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, Maret 2017

Penulis



AMIN BUDI PRASETYA

Nim. B 200 110 122

PENGUKURAN KINERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KARANGANYAR SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS PUBLIK

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kota Karanganyar pada tahun 2011-2014 ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan dan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada tahun 2011-2014.

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi dan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2012-2015. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2012-2015.

Berdasarkan hasil diketahui Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014 relative lebih efisien dibandingkan tahun 2012, 2013 dan 2015. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dinilai kurang efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya lebih dari 100%. Perolehan bagian laba usaha daerah yang berasal dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun dari tahun sebelumnya dan hanya mampu merealisasikan sebesar targetnya, hal itu dapat disebabkan karena menurunnya produktifitas obyek yang dikelola. Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 sebesar 18,65%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan Jumlah Pendapatan. Hal ini berarti dari tahun ke tahun Pendapatan di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan. Belanja Operasi Tahun 2012 mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar 27,84% mengalami peningkatan ditahun 2014 sebesar 95,99% mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 40,70% mengalami. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah.. Belanja Modal Tahun 2012 semakin mengalami peningkatan ditahun 2013 menjadi 20,95 mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 50,38% mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 8,22%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal masih kurang baik.

Kata kunci : Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi , Rasio Pertumbuhan, dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of local government Karanganyar City in 2011-2014 in terms of independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and growth ratio and to determine the level of economic growth (GRDP) in 2011-2014.

Sample in this research is report of realization and budget of local government of Karanganyar Regency for fiscal year 2012-2015. Economic growth data Karanganyar District budget year 2012-2015. Based on the results, it is known that the Regional Government Expenditures of Karanganyar Regency in 2014 are relatively more efficient than in 2012, 2013 and 2015. The local government of Karanganyar Regency is considered less budget efficiency because the efficiency ratio is more than 100%. Acquisition of the share of regional business profits derived from the BUMD and the result of separated wealth management declined from the previous year and only able to realize the target, it can be caused by decreased productivity of managed objects. The ability of Local Government of Karanganyar Regency to maintain and increase the revenue of PAD from Year 2014 to Year 2015 by 18.65%. This growth is due to the Regional Government of Karanganyar Regency has managed to optimize its ability to increase the acquisition of Total Income. This means that from year to year Income in Karanganyar District has increased. Operational Expenditure in 2012 has increased in the year of 2013 by 27.84%, increasing in 2014 by 95.99% decreased in 2015 by 40.70% experienced. This growth is influenced by the increase in Public Apparatus Expenditure and Regional Apparatus Expenditure. Capital Expenditure 2012 is increasing in 2013 to 20.95, rising in 2014 by 50.38% decreasing by 2015 by 8.22%. This means the performance of the Regional Budget of Karanganyar Regency seen from the acquisition of Capital Expenditure Growth Ratio is still not good.

Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Growth Ratio, and Economic Growth Rate (GRDP)

1. PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan berbeda dengan organisasi komersial. Salah satu ciri dari organisasi ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan bertujuan profit oriented. Organisasi sektor publik, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, mengelola dan mengalokasikan sumber daya publik untuk mencapai tujuan. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik. Pertanggungjawaban baik berupa aktivitas atas sumber daya, termasuk bagaimana pengelolaan keuangan daerah (Marsiwi, 2010 dalam Marsiwi dan Hartono, 2014).

Otonomi daerah berarti terjadinya pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dengan pemenuhan asas akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan

dana publik sangat menuntut adanya pengelolaan dana daerah yang bertanggungjawab. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis yang digunakan meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah dengan persetujuan DPR – RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang Keuangan Negara :

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Ketiga perangkat UU tadi menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management)

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Saputra, 2014)

Menurut Halim (2001) dalam Saputra (2014) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Selanjutnya berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data atau informasi keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Informasi keuangan yang dimaksud adalah berupa penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sebagai salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana kinerja pemerintah daerah pada tahun 2011-2014 ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan? Bagaimana tingkat Pendapatan Domestik Bruto (PDRB) pada tahun 2011-2014?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kota Karanganyar pada tahun 2011-2014 ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada tahun 2011-2014

2. METODE

2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Laporan realisasi dan anggaran pemerintah daerah Kabupaten

Karanganyar tahun anggaran 2012-2015 dan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2012-2015.

2.2.Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiyono, 2010: 62) dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) tahun 2012-2015.

2.3.Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang mendukung analisis data. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 3.1. Laporan realisasi dan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2012-2015
- 3.2. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2012-2015

2.4.Definisi Operasional Variabel

2.4.1. Rasio Kemandirian

Menghitung seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk perhitungan rasio kemandirian, menggunakan rumus yang telah dilakukan oleh Halim (2002) yaitu :

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

2.4.2. Rasio Efektivitas

Mengukur efisiensi penerimaan PAD yang dibandingkan dengan rencana PAD. Pengukuran rasio ini menggunakan analisis yang digunakan Halim (2002) yaitu :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan sesuai potensi riil daerah}}$$

2.4.3. Rasio Efisiensi

Menghitung rasio efisiensi dengan membandingkan penerimaan dari PAD dan biaya yang dikeluarkan untuk PAD. Indikator capaian rasio ini jika rasio dicapai kurang dari 1 (100%) maka kinerja daerah efisiensi dalam penggunaan PAD (Halim, 2002) rumus rasio efisiensi yaitu :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

2.4.4. Rasio Pertumbuhan

Menghitung rasio pertumbuhan, dengan menggunakan rumus yang digunakan Wahyuni (2007) sebagai berikut:

$$\text{a. Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}}$$

$$\text{b. Pertumbuhan Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}_t - \text{Belanja Rutin}_{t-1}}{\text{Belanja Rutin}_{t-1}}$$

$$\text{c. Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}_t - \text{Belanja Modal}_{t-1}}{\text{Belanja Modal}_{t-1}}$$

2.4.5. Rasio Pertumbuhan Ekonomi

Menghitung pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dicapai Kabupaten Karanganyar menggunakan hasil penelitian Budiono (1999) dan Handayani (2011) dalam Marsiwi dan Hartono (2014) yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini diprosikan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari perhitungan rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa pada tahun ini belanja Pemerintah Daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Dilihat dari prosentase hasil perhitungan rasio ini, Kabupaten Karanganyar telah efisien dalam melakukan kegiatan belanjanya, karena terlihat kesemua prosentasenya di atas 100%. Penurunan rasio efisiensi terjadi pada tahun 2014, hal tersebut dikarenakan pengeluaran biaya Kabupaten Karanganyar untuk belanja pada tahun 2014 mendekati angka yang dianggarkan.

Tidak dapat dikatakan angka berapa yang baik untuk indikator rasio efisiensi belanja daerah, namun dapat dilihat pergerakan belanja tahun 2012 sampai 2015. Namun pengeluaran belanja pada setiap pemerintah daerah juga mesti dilihat tergantung dengan dinamasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Maka dari itu dalam mengatakan bahwa sebuah Pemerintah Daerah telah efisien, maka perlu dipertimbangkan juga apa-apa saja yang menjadi penyebab ataupun menjadi dampak apabila terjadi kenaikan dan juga penurunan pada belanja daerah. Pemerintah Daerah tidak dapat terlalu hemat, hanya karena total belanjanya sudah membengkak, kemudian pada tahun

berikutnya menurunkan belanjanya tetapi tidak mempertimbangkan apa-apa yang dibutuhkan sebagai kebutuhan primer bagi pembangunan untuk mengembangkan kota/kabupaten tersebut.

Dilihat dari perhitungan table IV.12 belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014 relative lebih efisien dibandingkan tahun 2012, 2013 dan 2015. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dinilai kurang efisiensi anggaran karena rasio efisiensinya lebih dari 100%.

3.2. Rasio Efektifitas

Efektif merupakan kemampuan untuk merealisasikan yang telah direncanakan, dalam hal ini seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100%. Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Karanganyar dapat terealisasi sebesar 116,25%, tahun 2013 naik ke prosentase angka 126,66%, tahun 2014 turun ke prosentase angka 127,03%, tahun 2015 turun ke prosentase 116,82%. Realisasi dan anggaran PAD pada tahun ini sebenarnya naik, tapi pencapaian untuk memenuhi target menurun hal ini disebabkan karena perolehan bagian laba usaha daerah yang berasal dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun dari tahun sebelumnya dan hanya mampu merealisasikan sebesar targetnya, hal itu dapat disebabkan karena menurunnya produktifitas obyek yang dikelola. Penetapan target atau anggaran PAD ditetapkan berdasar potensi riil daerah. Sebenarnya hampir semua elemen PAD naik dari tahun sebelumnya. Target PAD pada tiga tahun ini cukup baik, Kabupaten Karanganyar dan dapat merealisasikannya dengan lebih tinggi. Semua realisasi elemennya mengalami kenaikan, tetapi apabila berkaitan dengan kemandirian tetap belum mandiri karena memang pendapatan Kabupaten Karanganyar ini sebagian besar masih berasal dari dana transfer. Dari pergerakan yang fluktuatif tersebut dengan adanya penurunan efektifitas Pemerintah Daerah harus dapat melihat sebab penurunan, mungkin

ketidakmampuan dalam pencapaian terhadap targetnya ataupun penurunan perolehan dari salah satu atau beberapa elemen PAD kemudian dapat lebih mengoptimalkan perolehan PAD dengan memberdayakan elemen PAD yang paling sesuai untuk lebih diberdayakan dengan cara yang lebih efektif dan efisien agar dapat memenuhi keinginan yang ingin dicapai dan juga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, dilihat dari rasio efektifitas PAD ini kinerja keuangan dari segi rasio efektivitas PAD yang paling baik adalah pada tahun 2008. Tetapi sebenarnya rata-rata setiap tahunnya telah menunjukkan prosentase yang menandakan kalau PAD Kabupaten Karanganyar telah efektif antara besarnya target dan realisasinya. Kembali lagi, dalam melihat kenaikan PAD perlu memperhatikan apakah penyebab kenaikan tersebut sudah tepat dalam pengeloaannya, artinya jangan sampai membebani rakyat. Tepat di sini dalam artian bahwa dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi tidak harus berlomba-lomba hanya untuk menambah PAD, yang justru menimbulkan beban baru bagi masyarakatnya. Terlebih-lebih jangan malah mematikan potensi yang ada, karena pungutan retribusi yang besar.

3.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ini berarti tidak tergantung terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat kemandirian juga tinggi. Rasio kemandirian juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD yang berarti menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Dilihat dari tahun 2012 ke 2015 kemandirian cenderung mengalami kenaikan. Kemandirian keuangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013 adalah sebesar 108,63%. Dimana realisasi PAD nya hanya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp 77,084,436,396.00 atau 7,70%. Jadi, dilihat dari prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, Kabupaten Karanganyar masih belum mandiri, karena dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar masih tergantung dengan dana dari pihak eksternal. Kemandirian keuangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 adalah sebesar 34,58%. PADnya mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, tapi hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 34,58% terhadap pendapatan daerah. Jadi, dilihat dari prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, Kabupaten Karanganyar masih belum mandiri. Kemandirian keuangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2015 adalah sebesar -19,70%. PAD nya mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, tapi hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 19,70% terhadap pendapatan daerah. Jadi, dilihat dari prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, Kabupaten Karanganyar masih belum mandiri. Jadi, dilihat dari prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, Kabupaten Karanganyar masih belum mandiri.

Dengan demikian peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu untuk lebih merealisasikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar. Dilihat dari kontribusi dana internal yang lebih kecil daripada dana eksternal terhadap pendapatan, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Karanganyar belum mandiri selama tiga tahun tersebut. Tapi dilihat dari pergerakan rasionya, prosentase tertinggi adalah tahun 2012 dan tahun 2015, yang berarti bahwa kinerja kemandirian Kabupaten Karanganyar

yang terbaik adalah tahun 2013. Artinya kinerja untuk tidak bergantung dengan dana dari pihak eksternal paling kecil dibanding dengan tahun-tahun lainnya. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam membiayai kegiatan pemerintahannya masih kurang dan termasuk dalam golongan instruktif.

3.4. Rasio Pertumbuhan

3.4.1 Rasio Pertumbuhan PAD

Pada tahun 2012 PAD sebesar Rp 116.706.893.419,00 mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar Rp 161.715.929.349,00 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2013 sebesar 38,57%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 sebesar 38,57% dan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 215.298.860.199 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2013 sebesar 33,13%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2013 ke Tahun 2014 sebesar 33,13% dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 215.298.860.199 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2014 sebesar 33,13%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2014 ke Tahun 2004 sebesar 33,139% dan tahun 2015 meningkat sebesar 255.445.549.750,00 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2015 sebesar 18,65%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 sebesar 18,65%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam

meningkatkan perolehan PAD yang ditunjukkan dengan kenaikan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Hal ini berarti dari tahun ke tahun PAD di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan.

3.4.2 Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan

Pada tahun 2012 Pendapatan mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar 11,43% mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 11,43% mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 18,06% mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 13,49% Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan Jumlah Pendapatan dari Tahun 2012 ke Tahun 2015. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan Jumlah Pendapatan. Hal ini berarti dari tahun ke tahun Pendapatan di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan.

3.4.3 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2012 mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar 27,84% mengalami peningkatan ditahun 2014 sebesar 95,99% mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 40,70% mengalami. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah.

3.4.4 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2012 semakin mengalami peningkatan ditahun 2013 menjadi 20,95 mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 50,38% mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 8,22%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal masih kurang baik.

Belanja Modal mengalami kenaikan ditahun 2014 menjadi Rp 223.287.900.900,00 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2014 sebesar 95,99%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal semakin baik.

Rasio pertumbuhan yang cenderung naik dari tahun ke tahun menandakan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan profesionalitas Kabupaten Karanganyar dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal itu dapat dicapai dengan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu ditingkatkan.

3.4.5 Rasio Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil tersebut pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dicapai Kabupaten Karanganyar menggunakan hasil mengalami penurunan pada tahun 2015, hal ini pertumbuhan dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto yang dicapai melalui proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang sudah baik meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 0,092104.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013 sampai 2015 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Rasio Efisiensi

Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2014 relative lebih efisien dibandingkan tahun 2012, 2013 dan 2015. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dinilai kurang efisien anggaran karena rasio efisiensinya lebih dari 100%.

4.1.2 Rasio Efektifitas

Pada tahun 2012 PAD Kabupaten Karanganyar dapat terealisasi sebesar 116,25%, tahun 2013 naik ke prosentase angka 126,66%, tahun 2014 turun ke prosentase angka 127,03%, tahun 2015 turun ke prosentase 116,82%. Realisasi dan anggaran PAD pada tahun ini sebenarnya naik, tapi pencapaian untuk memenuhi target menurun hal ini disebabkan karena perolehan bagian laba usaha daerah yang berasal dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun dari tahun sebelumnya dan hanya mampu merealisasikan sebesar targetnya, hal itu dapat disebabkan karena menurunnya produktifitas obyek yang dikelola.

4.1.3 Rasio Pertumbuhan

4.1.3.1 Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan PAD kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2012 ke Tahun 2013 sebesar 38,57% dan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 215.298.860.199 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2013 sebesar 33,13%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2013 ke Tahun 2014 sebesar 33,13% dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 215.298.860.199 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2014 sebesar 33,13%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2014 ke Tahun 2004 sebesar 33,139% dan tahun 2015 meningkat sebesar 255.445.549.750,00 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2015 sebesar 18,65%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 sebesar 18,65%.

4.1.3.2 Rasio Pertumbuhan Jumlah Pendapatan

Pada tahun 2012 Pendapatan mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar 11,43% mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 11,43%

mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 18,06% mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 13,49% Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan Jumlah Pendapatan dari Tahun 2012 ke Tahun 2015. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan Jumlah Pendapatan. Hal ini berarti dari tahun ke tahun Pendapatan di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan.

4.1.3.3 Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun 2012 mengalami kenaikan ditahun 2013 sebesar 27,84% mengalami peningkatan ditahun 2014 sebesar 95,99% mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 40,70% mengalami. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah.

4.1.3.4 Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2012 semakin mengalami peningkatan ditahun 2013 menjadi 20,95 mengalami kenaikan ditahun 2014 sebesar 50,38% mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 8,22%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal masih kurang baik.

4.2.Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:

- 4.2.1. Analisis rasio yang digunakan hanya meliputi Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan.
- 4.2.2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Karanganyar
- 4.2.3. Perhitungan penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan metode analisis Rasio Keuangan saja sehingga hasil penelitian ini akan berbeda bila menggunakan metode lain.

4.3.Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan diatas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- 4.3.1. Sebaiknya pemerintah kota Karanganyar terus mengali potensi yang ada di wilayahnya agar kedepannya akan meningkatkan pendapatan PADnya.
- 4.3.2. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengambil tahun penelitian yang lebih panjang.
- 4.3.3. Bagi penelitian mendatang sebaiknya analisis rasio yang digunakan tidak hanya Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsil. Munir. 2004. Analisis Transformasi Struktural dan Basis Ekonomi Daerah di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan UNS*, Juli. Vol 1, No. 1, hal. 15-27.
- Dori Saputra. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kota di Propinsi Sumatera Barat. *Artikel Ilmiah Universtias Negeri Padang*.
- Dwiati Marsiwi dan Arif Hartono, 2014, Pengukuran Kinerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Sebagai Wujud Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ekulilibrium*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2014.
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. AMP YKPN.
- Handayani. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Pemeirntah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol 12 No. 2 Juni 2016.
- Heny Susantih dan Yulia Saftiana, 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. *SNA Palembang Universitas Sriwijaya*. 3-9 November 2009.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pendapatan Regional Kabupaten Karanganyar Tahun 2004. Kantor BPS Kabupaten Karanganyar, Karanganyar.
- Pramono, Joko. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*. Vol. 7 No. 13, Juli 2014.
- Saputra. Fegi. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Laporan Arus Kas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Skripsi Dipublikasikan.
- Yuni Kusumaning Ayu, 2014. Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri Tahun Anggaran 2009-2012). *Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri*.